

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang

M. Amin Kurniawan<sup>1\*</sup>, Soemarno<sup>2</sup>, Mangku Purnomo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam, Universitas Brawijaya

<sup>2</sup>Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

<sup>3</sup>Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

### Abstrak

Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang ialah salah satu Desa di Kabupaten Jombang yang berhasil merintis dan mengembangkan Program Desa Berseri dan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara bersama. Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Mojokrapak melalui program Desa Berseri dan KRPL dianalisis berdasarkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kehadiran dalam pembahasan program kerja, keaktifan dalam menyampaikan masukan/saran/usulan dalam pembahasan program, keaktifan dan mengikuti dan menentukan materi pelatihan, pelaksanaan kegiatan fisik, keterlibatan dalam pengelolaan anggaran dana serta indikator dalam pembagian hasil kegiatan masuk dalam kategori Pemberian Informasi atau dikategorikan dalam derajat Partisipasi Semu. Karakteristik sumbangan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, dibandingkan memberikan bantuan dalam bentuk uang, pemikiran atau yang lain. Motivasi masyarakat untuk terlibat sebagian besar karena faktor internal individu, yaitu harapan dan keinginan untuk hidup di lingkungan desa yang indah, bersih dan nyaman. Sedangkan alasan untuk tidak terlibat, sebagian karena alasan hambatan internal individu masing-masing antara lain waktunya tersita untuk mencari nafkah dan persepsi bahwa lingkungan desa sudah baik. Secara umum partisipasi masyarakat di Desa Mojokrapak dalam program KRPL dan Desa berseri berhubungan dengan status kepemilikan rumah dan pengetahuan awal tentang program.

**Kata kunci:** masyarakat, partisipasi, pengelolaan lingkungan

### Abstract

Mojokrapak Village at Tembelang District may claim its success in initiating and establishing Program Desa Berseri and Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) altogether among other villages in Jombang Regency (East Java Province, Indonesia). The people's participation in the programs is good as measured by several indicators, such as their attendance in the discussion of programs along with the schedule of accomplishment, their active participation in giving suggestions towards the programs, their attendance in the trainings and suggestions on topic of the trainings, their participation in the physical-related and budgeting-related activities, and their fair distribution of the outcome of the activities. This kind of involvement can be categorized as Informing or Tokenisme Participation. People's active involvement in such environment management activities was mainly physical help rather than in the forms of donation or ideas. Their motivation to participate in the programs was considerably high for an internal reason, that is, a hope of living in a beautiful, clean, and comfortable environment. Meanwhile, some people were known to not participate in the programs for some reasons, such as busy working and a perception that their environment has already been good enough for living. In general, the participation of people in Mojokrapak Village in the programs is inevitable from the ownership of the houses and their initial knowledge concerning the programs.

**Keywords:** environment management activities, people participation

### PENDAHULUAN

Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang ialah salah satu Desa di Kabupaten Jombang yang berhasil merintis dan mengembangkan Program Desa Berseri dan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara bersama. Program Desa Berseri (Bersih dan Lestari) ialah program

pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang dikembangkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan menciptakan pengetahuan, perubahan perilaku, kesadaran dan budaya masyarakat, melalui upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Harapannya ialah terwujudnya lingkungan desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari, nyaman dan asri. Sedangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari ialah Program yang diinisiasi Kementerian Pertanian berbasis pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga

Alamat Korespondensi Penulis:

**M. Amin Kurniawan**

Email : amined.kurniawan@gmail.com

Alamat : Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam, Universitas Brawijaya

untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan bersumber sumber daya setempat, pelestarian dan pemanfaatan tanaman pangan secara berkelanjutan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua program tersebut memiliki konsep dan tujuan yang hampir sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pendekatan desa/ kelurahan dilakukan dengan melibatkan partisipasi unsur-unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi serta dilakukan secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat sangat penting karena, pertama, merupakan metode untuk mendapatkan informasi tentang keadaan, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap sebuah program; kedua, masyarakat akan merasa memiliki dan menjamin keberlanjutannya apabila dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasinya; ketiga partisipasi merupakan hak setiap warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang [1]. Alasan tersebut merupakan dasar pertimbangan pentingnya penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat di desa Mojokrapak khususnya dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penetapan strategi pembangunan di daerah terutama pelaksanaan program lingkungan hidup.

Partisipasi ialah proses keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, dan ikut berperan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan secara adil. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi pasif ialah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan yang telah dirancang, dilaksanakan dan dikontrol oleh orang/ pihak lain. Sedangkan partisipasi aktif ialah proses melibatkan masyarakat Sebagai subyek yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dan bertindak sendiri [2].

Untuk menerapkan pembangunan berdasar partisipasi perlu ditentukan desain model partisipasi publik sesuai dengan kebutuhan, terutama lingkup partisipasi yang sesuai. Di sisi lain, pelaksanaan konsep perencanaan berdasar partisipasi masyarakat tidak akan maksimal tanpa didukung beberapa hal mengenai perubahan sosio kultur dalam masyarakat daerah, yaitu: a)

keterlibatan seluruh pengambil stakeholder, b) upaya pengembangan kelembagaan di masyarakat yang kuat dan memiliki legitimasi, c) adanya proses dialog dan komunikasi yang mengaeah pada kesepakatan bersama (*collective agreement*), dan d) adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui permasalahan, kebutuhan, potensi dan mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kapasitasnya [3].

Menurut Sastroputro tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh program pembangunan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi fisik geografis lingkungan. Kondisi sosial ekonomi antara lain meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, kultur dan strata sosial dalam sistem kemasyarakatan. Program pembangunan ialah kegiatan yang disusun dan direncanakan oleh pemerintah, berupa organisasi masyarakat dan strategi kebijaksanaan. Kondisi fisik geografis lingkungan misalnya waktu dan jarak tempuh, akses transportasi dan lain-lain. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan desa/ kelurahan merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan partisipasi masyarakat [4].

Menurut Arnstein, partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuasaan masyarakat (*Citizen Participation Is Citizen Power*). Arnstein membagi partisipasi masyarakat dalam model tangga dengan delapan tingkat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*), berdasar tingkat peran, wewenang dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari derajat tanpa partisipasi masyarakat (*Non Participation*), partisipasi semu (*Degrees Of Tokenism*) sampai dengan kontrol kekuasaan masyarakat (*Degrees Of Citizen Powers*) [5].

Tujuan dari penelitian ialah: mengetahui tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pengelolaan lingkungan hidup terutama melalui sinergi program Desa Berseri dan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Mojokrapak, mengidentifikasi faktor-faktor karakteristik yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat peran serta masyarakat dan mengetahui motivasi yang bisa mendorong dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan kedua jenis data baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapatkan dengan penelitian lapangan dengan metode pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Sedangkan data sekunder didapatkan dari instansi terkait terutama dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten atau data-data lain yang berasal dari laporan, jurnal, artikel, buku dan lain-lain. Sumber data primer adalah responden dari masyarakat (rumah tangga) yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam program Desa Berseri dan KRPL di Desa Mojokrapak.

Metode pengambilan sampel yang dipilih adalah Proportional Stratified Random Sampling, karena sampel diambil dari masyarakat yang melaksanakan program Desa Berseri dan KRPL, masyarakat yang tidak melaksanakan program dan perangkat desa atau kader penggerak. Responden diambil dari 2 dusun yaitu di Desa Mojokrapak, yaitu Dusun Bulak dan Dusun Ledok. Jumlah sampel responden sebanyak 87 orang. Untuk menentukan sampel respondennya dipilih teknik purposive sampling.

Keterlibatan masyarakat diukur dengan besarnya kontribusi dan kesediaan menyumbangkan pemikiran, tenaga, uang atau bentuk kontribusi lain. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat dinilai dari kehadiran, keaktifan menyampaikan usulan/ masukan/ saran, keaktifan dalam mengikuti dan menentukan materi pelatihan, keterlibatan dalam kegiatan fisik, keterlibatan dalam anggaran kegiatan dan pemanfaatan hasil. Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan diukur dengan menggunakan metode kuantitatif melalui perhitungan skoring dari variabel. Jumlah skoring dari semua variabel diklasifikasi dan diidentifikasi dalam tipologi Delapan Tangga Partisipasi teori Arnstein. Interval scoring tipologi Tangga Partisipasi secara menyeluruh diketahui dari kategori tingkat partisipasi yang dikalikan dengan jumlah sampel.

Bentuk peran serta dilakukan analisis distribusi frekuensi, dari data kuisioner yang didapat dari masyarakat, sehingga dapat diketahui bentuk partisipasi masyarakat. Variabel bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi: partisipasi dalam bentuk uang, makanan, perlengkapan atau bahan bangunan, sumbangan tenaga atau partisipasi pemikiran.

Untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat pada peran serta masyarakat digunakan metode penelitian deskriptif analisa kuantitatif dengan tabulasi silang. Tabulasi silang (cross tab) digunakan untuk menghitung variasi nilai yang berbeda antara dua variabel atau lebih. Beberapa variabel yang berbeda akan ditabulasikan ke dalam matriks. Hasil tabulasi silang ditampilkan dalam bentuk tabel, dengan variabel-variabel sebagai kolom dan barisnya.

Metode penelitian untuk menentukan motivasi ditentukan dengan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden dan dilakukan shortlist menggunakan kuisioner. Analisis dilakukan dengan distribusi frekuensi, dari data kuisioner yang didapat dari masyarakat, sehingga dapat diketahui bentuk motivasi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menerapkan pelaksanaan program berdasar partisipasi masyarakat dalam kegiatan Desa Berseri dan KRPL, harus didukung oleh komunikasi dan pemberian informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Responden yang mengaku tahu tentang program Desa Berseri dan KRPL sebanyak 51,72% dan yang mengaku tidak tahu sebanyak 48,28%. Untuk responden yang mengaku tahu tentang program Desa Berseri sebagian besar memahami sebagai kegiatan kerja bakti, menjadikan lingkungan desa sehat, bersih dan lestari serta mengurangi polusi air, udara dan sampah. Sedangkan pemahaman terhadap program KRPL ialah melakukan penghijauan di lingkungan desa serta melakukan budidaya tanaman sayur dan buah di pekarangan.

Sebanyak 75,86% responden lebih memilih membantu dengan tenaga fisik atau kerja bakti, apabila diadakan kegiatan pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Presentase yang sama yaitu 8,05% memilih memberikan bantuan berupa saran, uang dan barang.

**Tabel 1.** Bentuk Partisipasi Responden

Bentuk Partisipasi	Uang	Barang	Tenaga	Saran	Uang dan barang	Tidak membantu	Total
Jumlah	4	3	66	7	7	0	87
Prosentase	4,60%	3,45%	75,86%	8,05%	8,05%	0,00%	100,00%

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Mojokrapak dianalisis berdasarkan peran serta masyarakat dengan melihat kehadiran dalam pembahasan program kerja, keaktifan dalam

menyampaikan masukan/ saran/ usulan dalam pembahasan program, keaktifan dan mengikuti dan menentukan materi pelatihan, pelaksanaan kegiatan fisik, keterlibatan dalam pengelolaan anggaran dana serta indikator dalam pembagian hasil kegiatan.

Keterlibatan dalam menghadiri pembahasan program masuk dalam kategori manipulasi, artinya responden merasa tidak pernah mendapatkan undangan atau turut serta menentukan agenda dan jadwal pertemuan. Pembahasan dan penetapan keputusan mengenai agenda dan jadwal pertemuan dilakukan oleh pemegang keputusan dalam hal ini pemegang kekuasaan. Manipulasi merupakan tingkatan peran serta yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dianggap obyek saja dalam penentuan agenda dan jadwal pertemuan.

Keaktifan dalam menyampaikan masukan/ saran dan usulan dalam kategori kemitraan, artinya masyarakat memiliki hak yang luas untuk menyampaikan pendapat, sejajar dengan pengambil keputusan. Pembahasan program KRPL dan Desa Berseri misalnya penentuan lokasi pembagian tong komposter, penentuan mekanisme operasional bank sampah, pembagian bibit tanaman atau pembagian bibit lele untuk budidaya dan lain-lainnya.

Partisipasi responden dalam menentukan dan mengikuti pelatihan masuk dalam kategori manipulasi, artinya tidak ada peran responden dalam tahapan tersebut. Pelatihan yang pernah dilakukan dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terkait Program Desa Berseri maupun KRPL diantaranya pelatihan pengelolaan sampah anorganik untuk kerajinan 3R, pelatihan bank sampah, budidaya tanaman sayur, pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Ketidakterlibatan seluruh masyarakat dalam pelatihan mengakibatkan hanya sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan terkait lingkungan hidup terutama kader dan anggota Formatif. Hal ini terlihat, bahwa misalnya masyarakat secara umum tidak bisa mengatasi problem hama pada sayuran mereka, masih terdapat sampah anorganik di dalam tong komposter, atau tidak memiliki kemampuan membuat produk olahan dari produk KRPL.

Terhadap tingkatan peran serta dalam kegiatan fisik masuk dalam kategori pendelegasian kekuasaan. Artinya masyarakat terlibat dalam menentukan dan melaksanakan sebagian kegiatan fisik. Kategori pendelegasian masyarakat termasuk dalam stratifikasi kontrol

kekuasaan masyarakat, artinya masyarakat memiliki kekuasaan dalam membagi, menentukan dan melaksanakan kegiatan fisik dalam Desa Berseri maupun KRPL. Keterlibatan dalam kegiatan fisik telah melibatkan semua kelompok, termasuk diantaranya kelompok miskin dan marginal. Tingkatan partisipasi juga terlihat bahwa sebagian masyarakat lebih banyak terlibat dalam kegiatan fisik, dibandingkan dengan berpartisipasi dalam bentuk lain.

Berdasar tangga partisipasi Arnstein, terhadap tingkatan peran serta dalam pengelolaan anggaran masuk dalam tingkat Penentruman (*Placation*) atau dikategorikan dalam derajat Partisipasi Semu (*Degree of Tokenism*). Masyarakat telah memberikan sumbangan uang untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, diberikan kesempatan menyampaikan usulan untuk penggunaan anggaran tersebut, tetapi tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya.

Penyediaan anggaran pembangunan dari pemerintah atau pemegang kekuasaan harus dievaluasi, karena akan menimbulkan ketergantungan masyarakat. Sekalipun uang yang diberikan dimaksudkan sebagai pemicu agar masyarakat berinisiatif melaksanakan program, seringkali akan mencetak mentalitas penerima, bukan membuat penerima menjadi lebih berdaya tetapi malah akan memiliki ketergantungan, sehingga menjadi penghambat keberlanjutan program [6]. Kontribusi masyarakat dalam bentuk uang juga akan menumbuhkan rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan suatu program [7]. Berdasar hasil wawancara terhadap responden Desa Mojokrapak, sumbangan dana yang diberikan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hampir tidak ada. Keterlibatan dalam hal anggaran hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat dan tokoh desa yang secara sosial ekonomi cukup.

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembagian hasil kegiatan menurut teori Arnstein berada pada pendelegasian kekuasaan. Artinya masyarakat beranggapan telah mendapatkan pembagian hasil secara adil dan ikut menentukan pembagian sebagian hasil. Pembagian keuntungan tersebut misalnya diantaranya hasil penjualan atau pemanfaatan tanaman budidaya yang ada di fasilitas umum termasuk di sisi jalan desa dan pembagian keuntungan dari pengelolaan bank sampah.

**Tabel 2.** Tabel Tingkat Peran Serta Masyarakat menurut Teori Arnstein

No	Variabel	Deskripsi	Tingkat Peran Serta	Frek. (F)	Scor (S)	FxS	Jumlah Total
1	Kehadiran dalam pembahasan Program KRPL maupun Desa Berseri	Tidak hadir	Manipulasi	51	1	51	207
		Hadir sekedar memenuhi undangan	Terapi	3	2	6	
		Hadir tetapi agenda dan jadwal pertemuan ditentukan oleh Pemegang kekuasaan.	Pemberian Informasi	13	3	39	
		Hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai agenda dan jadwal pertemuan, tetapi tidak dipertimbangkan.	Konsultasi	4	4	16	
		Hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai agenda dan jadwal pertemuan, tetapi yang menentukan tetap pemegang kekuasaan.	Penentruman	8	5	40	
		Hadir dan diberikan kesempatan menentukan agenda dan jadwal pertemuan, tetapi pelaksanaannya tetap pemegang kekuasaan.	Kemitraan	2	6	12	
		Hadir dan memiliki kesempatan merencanakan dan melaksanakan sebagian agenda dan jadwal pertemuan.	Pendelegasian Kekuasaan	5	7	35	
		Hadir dan memiliki kesempatan penuh untuk merencanakan dan melaksanakan agenda dan jadwal pertemuan.	Kontrol Masyarakat	1	8	8	
2	Menyampaikan masukan/ saran/ usulan dalam pembahasan Program	Tidak pernah memberikan masukan/ usulan/ saran dan tidak mendapat informasi	Manipulasi	34	1	34	281
		Hanya mendapat sedikit informasi, tetapi tidak pernah memberikan masukan/ usulan/ saran	Terapi	16	2	32	
		Mendapat informasi melalui sosialisasi, tetapi tidak ada kesempatan menyampaikan usulan/ pendapat.	Pemberian Informasi	6	3	18	
		Mendapat informasi, dan boleh menyampaikan pendapat, tetapi pendapat tidak dipertimbangkan	Konsultasi	2	4	8	
		Aktif berdiskusi, tetapi hanya sebagian pendapat yang dipertimbangkan, keputusan masih diambil oleh Pemegang kekuasaan/ pemerintah	Penentruman	5	5	25	
		Aktif berdiskusi dan mempunyai posisi yang sejajar dalam menyampaikan masukan saran/ usulan	Kemitraan	12	6	72	
		Memberikan masukan, dan memiliki hak untuk menentukan sebagian dari rencana	Pendelegasian Kekuasaan	4	7	28	
		Memberikan masukan, dan merasa memiliki hak penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi	Kontrol Masyarakat	8	8	64	
3	Mengikuti dan menentukan materi pelatihan	Tidak hadir	Manipulasi	51	1	51	205
		Hadir sekedar memenuhi undangan	Terapi	4	2	8	
		Hadir tetapi materi pelatihan telah ditentukan oleh Pemegang kekuasaan.	Pemberian Informasi	14	3	42	
		Hadir dan diberikan kesempatan untuk mengusulkan/ meminta materi pelatihan, tetapi tidak dipertimbangkan	Konsultasi	2	4	8	
		Hadir dan diberikan kesempatan untuk mengusulkan/ meminta materi pelatihan, tetapi yang menentukan tetap pemegang kekuasaan.	Penentruman	5	5	25	
		Hadir dan diberikan kesempatan menentukan materi pelatihan, tetapi pelaksanaannya tetap pemegang kekuasaan.	Kemitraan	7	6	42	
		Hadir dan memiliki kesempatan sebagian untuk merencanakan dan melaksanakan agenda dan materi pelatihan.	Pendelegasian Kekuasaan	3	7	21	
		Hadir dan memiliki kesempatan penuh untuk merencanakan dan melaksanakan agenda dan materi pelatihan.	Kontrol Masyarakat	1	8	8	

*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Amin, et al.)*

No	Variabel	Deskripsi	Tingkat Peran Serta	Frek. (F)	Scor (S)	FxS	Jumlah Total
4	Pelaksanaan kegiatan fisik	Tidak terlibat sama sekali	Manipulasi	39	1	39	285
		Terlibat karena dipaksa.	Terapi	1	2	2	
		Terlibat tetapi tidak pernah diberikan kesempatan menyampaikan dan menentukan pembagian tanggungjawab dan tugas.	Pemberian Informasi	11	3	33	
		Terlibat dan diberikan kesempatan menyampaikan pembagian tanggungjawab dan tugas, tetapi tidak dipertimbangkan.	Konsultasi	9	4	36	
		Terlibat dan diberikan kesempatan penuh untuk menyusun pembagian tanggungjawab dan tugas, tetapi keputusan tetap di pemegang kekuasaan.	Penentruman	6	5	30	
		Terlibat dan mendapat pembagian tanggung jawab dan tugas yang seimbang, tetapi pelaksanaan masih dilakukan pemegang kekuasaan	Kemitraan	5	6	30	
		Terlibat dan memiliki kewenangan menentukan dan melaksanakan sebagian kegiatan fisik	Pendelegasian Kekuasaan	13	7	91	
5	Pengelolaan anggaran dana	Tidak menyumbang anggaran sama sekali	Manipulasi	36	1	36	274
		Menyumbang tetapi tidak tahu peruntukan penggunaan anggaran	Terapi	13	2	26	
		Menyumbang, penggunaan anggaran dikelola pemegang kekuasaan dan laporan hanya diberikan satu arah, tidak ada kesempatan untuk bertanya.	Pemberian Informasi	1	3	3	
		Menyumbang, penggunaan anggaran dikelola pemegang kekuasaan dan ada kesempatan untuk bertanya/ menyampaikan usulan, tetapi tidak dipertimbangkan.	Konsultasi	3	4	12	
		Menyumbang dan diberi kesempatan untuk bertanya/ menyampaikan usulan, tetapi penggunaan anggaran tetap di pemegang kekuasaan.	Penentruman	20	5	100	
		Menyumbang dan memiliki kewenangan menentukan penggunaan anggaran, tetapi pelaksanaan tetap di pemegang kekuasaan.	Kemitraan	5	6	30	
		Menyumbang dan memiliki kewenangan menentukan peruntukan dan melaksanakan penggunaan sebagian dana.	Pendelegasian Kekuasaan	5	7	35	
6	Pembagian hasil kegiatan	Tidak pernah mendapatkan keuntungan dan	Manipulasi	20	1	20	323
		Mendapat hasil dan manfaat, tetapi tidak tahu bagiannya.	Terapi	27	2	54	
		Mendapat hasil dan manfaat, dan disampaikan bagiannya, tetapi tidak ada kesempatan untuk bertanya atau mengajukan saran.	Pemberian Informasi	3	3	9	
		Mendapat hasil dan manfaat, diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengajukan saran tetapi tidak dipertimbangkan.	Konsultasi	2	4	8	
		Diberi kesempatan penuh untuk membahas hasil dan manfaat, tetapi keputusan tetap di pemegang kekuasaan.	Penentruman	6	5	30	
		Mendapat pembagian hasil secara adil tetapi pembagian masih ditentukan oleh pemegang kekuasaan	Kemitraan	7	6	42	
		Mendapat pembagian hasil secara adil dan ikut menentukan pembagian sebagian hasil.	Pendelegasian Kekuasaan	16	7	112	
		Mendapat pembagian hasil secara adil dan ikut sepenuhnya menentukan.	Kontrol Masyarakat	6	8	48	
<b>TOTAL SKORING</b>			<b>Pemberian Informasi</b>				<b>1575</b>

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil program pembangunan sangat penting karena akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk berperan serta dalam setiap program pembangunan.

Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masuk dalam kategori Pemberian Informasi. Pada tangga partisipasi Informasi (Information) ini penyampaian informasi sudah dilakukan meskipun satu arah, tidak ada sarana dan kesempatan bagi masyarakat memberikan timbal balik. Penyampaian informasi dilakukan oleh Pemerintah, Perangkat Desa atau oleh Perwakilan Masyarakat yang terlibat dalam program. Dalam arti dalam tahapan partisipasi semu, masyarakat sasaran diajak, dipengaruhi bahkan diperintah untuk berperan dalam kegiatan, tetapi tidak akan terjaga keberlanjutannya.

Tingkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan seharusnya secara ideal dikatakan berpartisipasi secara penuh apabila berada pada tahap kekuasaan pada masyarakat (degrees of citizen powers) atau pada tingkatan kemitraan, pendelegasian kekuasaan atau pada tingkatan tertinggi kontrol masyarakat. Pada tahapan ini Pemerintah hanya berfungsi sebagai pemberi informasi dan fasilitator program [8].

Analisis karakteristik masyarakat dan korelasinya dengan keterlibatannya dalam program dilakukan dengan tabulasi silang atau crosstab dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan nilai chi square. Korelasi yang ingin diketahui antara lain karakteristik responden (jenis kelamin, umur, penghasilan, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal di desa, lama berumah tangga, luas pekarangan yang dimiliki, status kepemilikan rumah dan pengetahuan tentang program) terhadap variabel partisipasi masyarakat dalam kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan dalam menyampaikan masukan/ saran/ usulan, keikutsertaan dalam mengikuti dan menentukan materi pelatihan, kegiatan fisik, pengelolaan anggaran dan pemanfaatan hasil.

a) Hubungan Karakteristik Responden dengan Partisipasi Kehadiran dalam Rapat/pertemuan

Variabel umur, kepemilikan rumah, pengetahuan tentang program Desa Berseri dan KRPL berhubungan dengan kehadiran masyarakat di rapat/ pertemuan yang menentukan agenda dan jadwal pertemuan (Signikansi  $\alpha < 0,05$ ).

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada kelompok yang status kepemilikan rumahnya bukan milik sendiri, perlu dilakukan komunikasi interpersonal oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Komunikasi yang efektif juga ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Tindakan yang diharapkan ialah keikutsertaan atau partisipasi dalam kegiatan [9].

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan harus didukung oleh komunikasi dan pemberian informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Tingkatan pengetahuan yang paling dasar oleh individu ialah tahu (know) yaitu kemampuan individu untuk mengingat informasi yang disampaikan sebelumnya, sebelum individu memahami dan melakukan. Artinya penjelasan dan pemberian informasi mengenai program menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

b) Hubungan Karakteristik Responden dengan Keaktifan dalam menyampaikan masukan/ saran/ usulan

Lama berumah tangga memiliki korelasi dengan keaktifan dalam menyampaikan pendapat. Kedewasaan pola berpikir akan terlihat pada keluarga yang telah lama menikah. Interaksi dan komunikasi individu yang lama menikah tentunya akan berbeda dengan individu yang umur pernikahannya masih baru. Begitu juga dengan status kepemilikan rumah, memiliki korelasi dengan keaktifan dalam berdiskusi, karena rasa memiliki lingkungan yang lebih kuat, sehingga ingin ikut menyumbangkan pemikiran dalam pengelolaan lingkungan desa. Untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam menyatakan pendapat, peran fasilitator menjadi sangat penting. Fasilitator harus mampu secara substantif berada pada posisi netral, tidak menempatkan diri sebagai pembuat kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah serta membuat keputusan [10].

Seperti halnya dengan kehadiran responden dalam rapat, pemahaman masyarakat terhadap program Desa Berseri dan KRPL memiliki korelasi dengan peran serta dan keaktifan dalam mengemukakan pendapat.

c. Hubungan Karakteristik Responden dengan Variabel Partisipasi Keikutsertaan dalam mengikuti dan menentukan materi pelatihan

Status kepemilikan rumah dan pengetahuan tentang program memiliki korelasi dengan keaktifan responden dalam menentukan maupun mengikuti materi pelatihan. Selain itu usia memiliki korelasi dengan partisipasi dalam mengikuti pelatihan, yang ditunjukkan nilai Signikansi  $\alpha < 0,05$ . Kelompok usia yang lebih muda cenderung lebih dinamis dan ingin mengetahui sesuatu yang baru, yang diharapkan didapatkan dari kegiatan pelatihan.

d. Hubungan Karakteristik Responden dengan Variabel Partisipasi Kegiatan Fisik

Variabel luas pekarangan berhubungan erat dengan peran serta dalam program KRPL dan Desa Berseri. Masyarakat yang memiliki lahan pekarangan yang luas memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan, karena hasil dan manfaat yang didapatkan akan lebih besar. Metode pengembangannya pun lebih variatif, misalnya untuk budidaya tanaman sayur, tanaman toga, tanaman buah, ternak unggas, ikan atau usaha yang lain. Sedangkan korelasinya dengan program desa berseri, kegiatan penghijauan dengan pohon peneduh atau tanaman buah dapat dilakukan pada pekarangan yang luas. Selain itu kompos yang dihasilkan dari sampah organik, akan lebih maksimal bisa dimanfaatkan, apabila lahan pekarangan sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman. Selain itu status kepemilikan rumah dan pengetahuan mengenai program juga sangat berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan fisik.

e. Hubungan Karakteristik Responden dengan Variabel Partisipasi Pengelolaan Anggaran

Tingkat penghasilan memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan terkait program pengelolaan lingkungan di Desa Mojokrapak. Tingkat ekonomi yang cukup, akan membuat peran dalam memberikan bantuan uang untuk program semakin besar dan ikut menentukan dalam penentuan penggunaan anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran sangat bergantung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan kontrol terhadap program. Dalam pengelolaan anggaran desa, masyarakat harus terlibat secara penuh dan memiliki akses terhadap informasi penggunaan dana, proses penggunaan, transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana [11].

Selain itu pemahaman terhadap program KRPL dan Desa Berseri juga memiliki hubungan dengan peran serta masyarakat dalam

menyumbang dan mengelola anggaran pengelolaan lingkungan.

f. Hubungan Karakteristik Responden dengan Variabel Partisipasi Pemanfaatan Hasil

Status kepemilikan rumah dan pengetahuan mengenai program mempunyai hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil.

Luas pekarangan memiliki korelasi dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan fisik. Upaya mensosialisasikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit dapat dilakukan, diantaranya dengan budidaya tanaman dalam polibag dengan sistem vertikultur menggunakan rak bambu yang digantung.

Secara umum partisipasi masyarakat di Desa Mojokrapak dalam program KRPL dan Desa berseri berhubungan dengan status kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah pribadi pada umumnya akan memberikan pengaruh terhadap rasa memiliki dan kesadaran untuk ikut menjaga, memelihara dan mengelola sarana dan prasarana yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Pengetahuan awal tentang program Desa Berseri dan KRPL berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat dalam program. Pengetahuan merupakan hal yang penting dalam mengubah perilaku, persepsi, sikap, kebiasaan dan kepercayaan seseorang untuk lebih terlibat dalam suatu program [12]. Diperlukan komunikasi untuk mengubah pengetahuan dan sikap serta difusi/ diseminasi untuk mengubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat akan memberikan respon dan memberikan dukungan, apabila dalam pelaksanaan program kegiatan, dianggap telah memberikan manfaat kepada masyarakat, dipahami maksud dan tujuannya, melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi serta dipertanggungjawabkan secara terbuka [13].

Setiap kegiatan komunikasi terkait program pembangunan harus disampaikan secara informatif dan persuasif. Proses komunikasi termasuk didalam proses penyadaran masyarakat, yaitu seharusnya dengan:

1. Melakukan identifikasi permasalahan, kondisi, kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan menggali informasi dari masyarakat, tokoh desa, kelompok perempuan, kelompok miskin yang berhubungan dengan program Desa Berseri dan KRPL.

2. Menunjukkan pentingnya perubahan melalui program lingkungan yang ditawarkan.
3. Melakukan analisis alternatif pemecahan masalah dan memilih pemecahan masalah yang sesuai, dengan metode partisipatif.
4. Membuat kesepakatan pelaksanaan program, format dan bentuk kegiatan, waktu dan tempat kegiatan [10].

Motivasi dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan faktor yang mempengaruhi dan mendorong individu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Desa Berseri dan KRPL. Sebagian besar responden yaitu sebanyak 90%, menganggap motivasi untuk ikut berperan dalam program pengelolaan lingkungan hidup yaitu ingin hidup di lingkungan desa yang bersih, indah, nyaman dan sejahtera. Dorongan motivasi individu tersebut berdasar teori Dusseldorp, dibagi menjadi beberapa jenjang yaitu: partisipasi spontan, partisipasi terinduksi, partisipasi tertekan oleh kebiasaan, partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi dan partisipasi tertekan oleh peraturan. Hasil pada penelitian ini termasuk dalam kategori motivasi partisipasi spontan, yaitu alasan yang mendorong untuk ikut berperan serta karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan dan keyakinannya sendiri. Motivasi tersebut merupakan salah satu unsur pokok yang mendukung tumbuh dan berkembangnya partisipasi. Berdasar hasil penelitian tujuan atau goals yang diharapkan oleh responden dari program pengelolaan lingkungan ialah menginginkan lingkungan desa bersih, sehat, lestari dan asri bukan tercukupinya kebutuhan pangan, sebagaimana tujuan pengembangan KRPL. Untuk itu perlu dilakukan formulasi tujuan pengembangan program pengelolaan lingkungan baik untuk program Desa Berseri dan KRPL untuk tujuan yang diinginkan bersama oleh masyarakat.

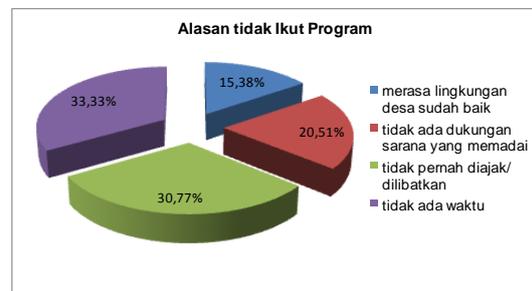
Pembangunan terencana berorientasi tujuan. Formulasi tujuan yang harus spesifik di tingkat masyarakat harus terlebih dahulu dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam formulasi tujuan harus diikuti dengan batasan sumberdaya pemerintah atau arahan pembangunan pemerintah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekecewaan karena tidak terpenuhinya harapan, sehingga menurunkan ketertarikan untuk berpartisipasi dan membahayakan legitimasi pemerintah pada pandangan masyarakat lokal.

Sedangkan responden yang tidak terlibat dalam program KRPL dan Desa Berseri beralasan karena tidak memiliki waktu, tidak pernah diajak atau dilibatkan, tidak ada sarana dan prasarana

yang cukup yang disediakan oleh Pemerintah maupun desa serta karena merasa cukup puas dengan lingkungan desa yang sudah baik. Artinya motivasi untuk terlibat sebagian besar karena faktor internal individu, yaitu harapan dan keinginan untuk hidup di lingkungan desa yang indah, bersih dan nyaman. Sedangkan alasan untuk tidak terlibat, sebagian karena alasan hambatan internal individu masing-masing antara lain waktunya tersita untuk mencari nafkah dan persepsi bahwa lingkungan desa sudah baik. Sedangkan alasan yang lain karena faktor eksternal diantaranya tidak pernah dilibatkan dan tidak ada sarana yang mendukung.



**Gambar 1.** Diagram Motivasi Ikut Serta dalam Program



**Gambar 2.** Diagram Alasan Responden tidak Ikut Serta dalam Program

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Mojokrapak masuk dalam kategori Pemberian Informasi atau dikategorikan dalam derajat Partisipasi Semu. Bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui program Desa Berseri dan KRPL lebih banyak memberikan bantuan berupa tenaga, dibandingkan bantuan dalam bentuk uang, pemikiran atau yang lain.

Secara umum partisipasi masyarakat di Desa Mojokrapak dalam program KRPL dan Desa

berseri berhubungan dengan status kepemilikan rumah dan pengetahuan awal tentang program.

Motivasi masyarakat untuk terlibat dalam program karena faktor internal individu, yaitu harapan dan keinginan untuk hidup di lingkungan desa yang indah, bersih dan nyaman. Sedangkan alasan untuk tidak terlibat, sebagian karena alasan hambatan internal individu masing-masing antara lain waktunya tersita untuk mencari nafkah dan persepsi bahwa lingkungan desa sudah baik.

#### **Saran**

Pelaksanaan pengembangan pengelolaan lingkungan hidup melalui program Desa Berseri dan KRPL harus dilakukan dengan metode pembangunan berbasis masyarakat.

Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan diajak untuk berpartisipasi penuh dan berperan memberikan kontribusi berupa uang, pemikiran, barang maupun tenaga.

Pengembangan tingkat partisipasi oleh Pemerintah Daerah dapat dimulai dengan pengembangan kelompok bukan dengan individu atau perorangan, pemberian informasi program kepada kelompok (kluster) masyarakat misalnya melalui, pertemuan dasawisma, RT, RW, Posyandu atau forum pengajian, komunikasi interpersonal oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama, peningkatan kemampuan dan fungsi fasilitator untuk pendampingan program.

Diperlukan formulasi tujuan pengembangan program Desa Berseri dan KRPL dengan tujuan yang diinginkan bersama oleh masyarakat. Fasilitator dapat mengajak masyarakat untuk mengetahui permasalahan, kebutuhan, potensi dan mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk menjadikan lingkungan desa lebih indah, bersih dan nyaman dan melakukan upaya bersama secara partisipatif.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih pada dosen pembimbing dan dosen penguji, serta masyarakat Desa Mojokrapak dan seluruh rekan di PSDA Universitas Brawijaya 2015, atas dukungan dan seluruh bantuannya sehingga tesis ini bisa selesai pada jadwal yang ditentukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

[1]. Safei, L. O. M, 2005. " Kajian Partisipasi Masyarakat terhadap Pelestarian Hutan Mangrove (Studi kasus : Desa Marobo

- Kecamatan Bone dan Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara" (tesis). IPB. Bogor
- [2]. Kurniawan, A. 2006. Pemberdayaan masyarakat. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Peranserta Lembaga Keagamaan/Adat oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Dirjen KP3K DKP di Bogor. pp. 26
- [3]. Asri, L. 2009. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Jurnal Tabularasa PPS Unimed. 6 (2).
- [4]. Saptorini. 2003. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Mangrove di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Undip. Semarang.
- [5]. Arnstein, S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. J. of the American Planning Association. 35 (4).
- [6]. Theresia, A., K.S. Andini, P.Nugraha dan T. Mardikanto. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alfabetha. Bandung.
- [7]. Deviyanti, D. 2013. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. eJournal Administrasi Negara. Unmul.
- [8]. Gumilar, I. 2012. Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. J. Akuatika. III (2).
- [9]. Adha, R. 2015. Peran Komunikasi Interpersonal Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pendatang pada Program Hijau Bersih Sehat (HBS) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Ejournal.ilkom.fisip. 3 (1) : 398
- [10]. Fardinlaia, 2013. Materi Fasilitasi. [http://fardinlaia.blogspot.com/2013/04/materi-teknik-fasilitasi\\_21.html](http://fardinlaia.blogspot.com/2013/04/materi-teknik-fasilitasi_21.html). 21 April 2013.
- [11]. Syamsi, S. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. JISIP. 3 (1).
- [12]. Wawan, A dan Dewi, M. 2010. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia. Nuha Medika. Yogyakarta.
- [13]. Judiono, F. Hartono, T dan Soeprapto, R. 2012 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Jalan. Wacana. 12